

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus menempatkan kemiskinan sebagai persoalan krusial dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Fenomena ini tidak sekadar berpangkal pada persoalan minimnya penghasilan warga negara. Aspek tersebut juga menunjukkan adanya hambatan struktural dalam memperoleh layanan pendidikan, fasilitas medis, peluang kerja, serta pemenuhan modal hidup esensial lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan masyarakat miskin berdasarkan standar belanja bulanan per individu yang berada di bawah ambang batas resmi negara. Situasi ini mendorong agenda pengentasan kemiskinan menjadi prioritas strategis kebijakan domestik demi memicu distribusi kemakmuran yang berkeadilan.

Konsep ekonomi Islam menempatkan tanggung jawab penanggulangan kemiskinan sebagai urusan bersama yang melibatkan masyarakat, bukan hanya kewenangan pemerintah. Dalam konteks ini, zakat, infak, dan sedekah berperan sebagai alat distribusi kekayaan untuk mendukung kelompok yang rentan sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat diwajibkan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat nisab dan haul atas harta mereka. Sedangkan infak dan sedekah bergantung pada keikhlasan individu serta turut berkontribusi dalam memperkuat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana ZIS yang

tepat dan efektif dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat secara berkelanjutan dan memutus rantai kemiskinan.

Karena didukung oleh lembaga manajemen pengelola yang lebih akuntabel, fungsi ZIS dalam mengurangi tingkat kemiskinan menjadi semakin penting. Sebagai hasil dari laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan peningkatan jumlah dana ZIS yang disalurkan secara nasional dari tahun 2015 hingga 2025. Pada awal periode, realisasinya berada di angka Rp2,20 triliun. Kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp44,29 triliun pada periode akhir. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan terbesar sebesar 65,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang lebih besar pada tahun 2022 sebesar 54,49% diikuti oleh peningkatan basis pelaporan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di seluruh Indonesia. Strategi ini menunjukkan bahwa modal sosial didistribusikan dan dimanfaatkan lebih cepat di negara ini.

Sebaliknya, kurva kemiskinan domestik dalam periode yang sama menunjukkan pola yang menurun meskipun terdapat fluktuasi. Persentase penduduk yang prasejahtera tercatat sebesar 11,22 persen atau sekitar 28,59 juta orang pada Maret 2015, kemudian turun menjadi 8,25 persen pada September 2025. Catatan penting terjadi pada tahun 2020 ketika rasio kemiskinan meningkat dari 9,41 persen pada semester I 2019 menjadi 9,78 persen pada semester I 2020 akibat dampak dari krisis kesehatan global Covid-19, dan terus meningkat hingga mencapai 10,14 persen pada semester I 2021, sebelum akhirnya mengalami penurunan yang konsisten di periode-periode berikutnya. Fakta ini menunjukkan

bahwa masalah struktural ini memerlukan penanganan yang terintegrasi lintas sektor, salah satunya melalui pemanfaatan instrumen keuangan syariah. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendetail, data tingkat kemiskinan dalam penelitian ini disusun berdasarkan semester dan grafiknya disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Kemiskinan Indonesia per Semester Tahun 2015–2025

Data diolah (2026)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa kuantitas kemiskinan domestik secara semesteran masih berada pada level yang mengkhawatirkan meskipun memperlihatkan penurunan sepanjang sepuluh tahun terakhir. Data semesteran memperlihatkan bahwa penurunan tersebut tidak berlangsung searah pada setiap periode; rasio kemiskinan bahkan sempat naik dari semester II 2019 (9,22 persen) menjadi semester II 2020 (10,19 persen) akibat tekanan pandemi, sebelum kembali menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah pada semester II 2025 (8,25 persen). Granularitas semesteran ini memperlihatkan dinamika jangka

pendek yang tidak tertangkap apabila data hanya diringkas secara tahunan, sehingga memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai pola pemulihan kemiskinan pascapandemi. Kondisi nyata ini melandasi pentingnya analisis empiris guna mengukur kontribusi riil alokasi ZIS terhadap penekanan kemiskinan beserta variabel makro yang memengaruhinya.

Penyaluran dana ZIS di seluruh negeri mengalami peningkatan yang sangat besar mulai tahun 2015 hingga 2025 karena adanya informasi penguatan aturan, pengembangan teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat secara luas. Jaringan manajemen filantropi keagamaan hingga tahun 2025 telah menyatukan ratusan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sah, antara lain BAZNAS tingkat pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di berbagai wilayah (BAZNAS, 2024; 2025). Penggunaan instrumen finansial digital seperti aplikasi transaksi QRIS, situs penggalangan dana elektronik, dan aplikasi internal SIMBA menjadi cara utama untuk mengumpulkan dana. Berdasarkan Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) BAZNAS, jumlah penyaluran ZIS-DSKL nasional dibagi menjadi dua semester, yakni semester I dan semester II, dengan rasio estimasi 55:45 yang sudah disetujui sebagai cara mengubah data dalam penelitian ini. Seluruh titik data dalam penelitian ini berasal dari hasil konversi angka penyaluran resmi tahunan yang dikeluarkan oleh LPZN BAZNAS. Berikut adalah data dan grafik yang merangkum pola pertumbuhan realisasi penyaluran modal filantropi nasional per semester dari tahun 2015 hingga 2025.



Gambar 1. 2 Grafik Penyaluran ZIS Nasional Indonesia per Semester Tahun 2015–2025

Data diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, membuktikan bahwa penyaluran dana ZIS pada skala nasional mengalami penguatan yang masif dan berkelanjutan, tumbuh dari skala triliun rupiah tunggal pada semester I 2015 (Rp1,21 triliun) menjadi lebih dari dua puluh triliun rupiah pada semester I 2025 (Rp24,36 triliun). Pola semesteran juga memperlihatkan bahwa realisasi semester I secara konsisten lebih tinggi dibandingkan semester II pada tahun yang sama, sebuah pola yang diperkirakan berkaitan dengan konsentrasi pembayaran zakat menjelang dan selama bulan Ramadan, yang pada dekade 2015–2025 secara umum jatuh pada paruh pertama tahun kalender. Kendati tren distribusi modal keagamaan ini terus menanjak, persoalan mendasar yang muncul berkaitan dengan relevansi lonjakan kuantitas tersebut terhadap penurunan angka kemiskinan di lapangan. Apabila kontribusi dana ZIS terhadap reduksi masyarakat miskin terbukti minim, penelitian lanjutan perlu mengidentifikasi berbagai variabel penghambat efisiensi

redistribusi kekayaan tersebut. Gejala kenaikan harga barang atau inflasi menjadi salah satu indikator utama yang perlu dibuktikan perannya secara empiris.

Faktor makroekonomi berupa inflasi memegang andil krusial yang wajib dilibatkan dalam menganalisis peta kemiskinan domestik. Secara teoritis, lonjakan inflasi bertindak sebagai pungutan terselubung yang menekan kesejahteraan kelompok rentan tanpa adanya sistem kompensasi otomatis. Kondisi ini menurunkan kemampuan belanja masyarakat miskin karena porsi anggaran rumah tangga mereka habis terserap untuk komoditas pangan pokok yang paling peka pada fluktuasi pasar (Lusiana, Salsabila & Kurniawan, 2024). Pola transmisi ekonomi tersebut berjalan tidak seimbang karena kelompok mapan memiliki instrumen investasi untuk mengamankan nilai aset mereka dari risiko penyusutan. Dampak buruk inflasi berimbas langsung pada nilai riil dana santunan ZIS yang diterima oleh kaum mustahik. Ketika inflasi melonjak bersamaan dengan masa pendistribusian dana bantuan, efektivitas program ZIS akan melandai pada momen krusial saat publik sangat membutuhkan intervensi keuangan. Nilai inflasi semesteran pada penelitian ini diperoleh dari pengomponan (compounding) angka inflasi bulanan month-to-month yang dipublikasikan BPS. Dinamika naik turunnya inflasi di Indonesia sepanjang periode 2015 hingga 2025 dipaparkan dalam rangkuman data dan grafik berikut.



Gambar 1. 3 Grafik Tingkat Inflasi Indonesia per Semester Tahun 2015–2025

Data diolah (2026)

Grafik pada Gambar 1.3 memperlihatkan bahwa, mengonfirmasi bahwa pergerakan inflasi domestik sepanjang tahun 2015 hingga 2025 tidak memiliki tren tunggal yang konsisten dan cenderung fluktuatif dari satu semester ke semester berikutnya. Inflasi tercatat relatif rendah pada semester II 2019 dan semester II 2020 (masing-masing 0,661 persen dan 0,600 persen), namun melonjak signifikan pada semester I 2022 (2,605 persen) seiring tekanan harga pangan dan energi global pascapandemi. Fase berikutnya mereda menuju level 0,490 persen pada semester II 2024 sebagai titik terendah dalam periode pengamatan, sebelum kembali naik moderat ke level 1,528 persen pada semester II 2025. Karakteristik data ini membuktikan eksistensi hubungan yang dinamis antara stabilitas harga komoditas dan keberhasilan pengentasan prasejahtera, sekaligus menegaskan bahwa variabel inflasi menjadi determinan penting dalam menentukan efisiensi penyaluran dana redistribusi seperti ZIS.

Fenomena yang perlu diteliti lebih lanjut adalah peningkatan signifikan dalam pengelolaan dana ZIS selama periode penelitian belum sepenuhnya sebanding dengan penurunan angka kemiskinan . Dana ZIS nasional telah meningkat lebih dari dua puluh kali lipat , dari Rp2,20 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp44,29 triliun pada tahun 2025. Namun , angka kemiskinan hanya menurun sebesar 2,97 poin persentase , turun dari 11,22 persen menjadi 8,25 persen . Selain itu , selama periode 2019–2021, realisasi ZIS justru meningkat bersamaan dengan kenaikan angka kemiskinan , dari 9,22 persen pada semester kedua tahun 2019 menjadi 10,19 persen pada semester kedua tahun 2020. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar kontribusi pendanaan ZIS dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia , sehingga perlu diuji melalui analisis empiris yang menyeluruh .

Fenomena serupa turut teramati di negara-negara serumpun yang menerapkan sistem pengelolaan zakat formal, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, sehingga memperkaya konteks perbandingan regional bagi penelitian ini. Berbeda dengan Indonesia yang mengelola zakat secara terpusat melalui BAZNAS, Malaysia menerapkan model desentralisasi di mana setiap negara bagian memiliki lembaga zakatnya masing-masing di bawah koordinasi Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), dengan data kutipan dihimpun pada portal Baitulmal JAWHAR (JAWHAR, 2026). Sebagai ilustrasi, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) mencatatkan kutipan zakat harta dan fitrah sebesar RM1,133 miliar pada tahun 2024, naik 10 persen dibandingkan RM1,031 miliar pada tahun 2023 (MalaysiaGazette, 2025). Lembaga Zakat Selangor (LZS)

turut mencatatkan rekor kutipan zakat sebesar RM1,22 miliar pada tahun 2024, capaian tertinggi dalam 31 tahun terakhir (MalaysiaGazette, 2025). Di sisi kemiskinan, Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) melaporkan bahwa kadar kemiskinan mutlak nasional menurun dari 6,2 persen pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen pada tahun 2024 (Malaysia Bangkit, 2025), sebuah pola penurunan yang searah dengan tren di Indonesia meskipun struktur kelembagaan pengelola zakatnya berbeda.

Brunei Darussalam menerapkan model yang berbeda lagi, yaitu pengelolaan zakat yang bersifat sentralistik penuh di bawah Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) melalui Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat (BAKAZ) di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama, sebagaimana diamanahkan oleh Laws of Brunei Chapter 77 tentang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi (International Journal of Zakat, 2023). Sebagai gambaran skala penyaluran, dana zakat tunai yang diagihkan kepada asnaf fakir dan miskin di Brunei pada tahun 1442H/2021 tercatat sebesar BND18,89 juta (Brudirect, 2022). Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang secara rutin mempublikasikan angka kemiskinan nasional, Brunei belum memiliki publikasi garis kemiskinan resmi yang setara, sehingga perbandingan kuantitatif langsung antara penyaluran zakat dan penurunan kemiskinan di negara tersebut masih terbatas dan perlu diverifikasi lebih lanjut apabila hendak digunakan sebagai pembanding kuantitatif yang ketat. Perbandingan lintas negara ini menegaskan bahwa persoalan efektivitas zakat dalam menekan kemiskinan bukan semata isu domestik Indonesia, melainkan tantangan bersama negara-negara serumpun dengan model kelembagaan yang

beragam, baik yang sentralistik seperti Indonesia dan Brunei, maupun terdesentralisasi seperti Malaysia, sehingga memperkuat urgensi penelitian ini untuk mengukur secara empiris kontribusi riil penyaluran dana ZIS terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian - penelitian berbagai pihak telah dilakukan untuk melihat pengaruh ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta inflasi terhadap tingkat kemiskinan, namun hasilnya belum mencapai kesepakatan yang sama dan konsisten. Studi yang dilakukan oleh Murobbi dan Usman pada tahun 2021 menunjukkan bahwa zakat berdampak negatif yang cukup besar terhadap tingkat kemiskinan, namun variabel inflasi dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Berlawanan dengan itu, penelitian Widiastuti (2021) menunjukkan bahwa ZIS, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan inflasi secara bersamaan mempunyai dampak terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan Lusiana, Salsabila, dan Kurniawan (2024) menemukan bahwa inflasi berdampak positif dan signifikan terhadap meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Perbedaan dan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian - penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ZIS, inflasi, dan kemiskinan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Di samping variasi temuan tersebut, mayoritas penelitian sebelumnya juga cenderung mengandalkan data tahunan dengan jumlah observasi yang tergolong minim, sehingga model regresi yang digunakan rawan mengalami keterbatasan derajat kebebasan (degrees of freedom) dan pada akhirnya dapat melemahkan keandalan hasil estimasi secara statistik. Menyikapi persoalan tersebut, penelitian

ini melakukan konversi data tahunan pada rentang periode 2015–2025 menjadi format semesteran, sehingga menghasilkan 22 titik observasi yang keseluruhannya bersumber dari data aktual tanpa melalui tahapan estimasi maupun imputasi terhadap nilai yang hilang. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang lebih menyeluruh sekaligus bukti empiris yang lebih kuat secara statistik terkait dinamika pengaruh penyaluran ZIS dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia, termasuk sejauh mana ketahanan program ZIS ketika dihadapkan pada guncangan ekonomi, seperti masa pandemi maupun lonjakan inflasi global.

Bertolak dari pemaparan tersebut, tampak suatu fenomena yang cukup menarik sekaligus mengindikasikan adanya celah penelitian (research gap) yang perlu dijawab secara empiris. Kendati penyaluran dana ZIS mengalami peningkatan yang cukup besar, penurunan angka kemiskinan yang terjadi ternyata belum sepadan dengan besarnya peningkatan penyaluran tersebut. Selain itu, gejala inflasi yang cukup tajam, khususnya pada semester I tahun 2022, diduga turut memengaruhi daya beli masyarakat miskin sekaligus efektivitas program ZIS dalam mengentaskan kemiskinan. Berangkat dari kesenjangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian empiris dengan judul: **"Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2015–2025"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2015–2025?
2. Apakah inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2015–2025?
3. Apakah penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bersama inflasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2015–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis serta menguji pengaruh penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2015–2025.
2. Menganalisis serta menguji pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2015–2025.
3. Menganalisis serta menguji pengaruh penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan inflasi secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2015–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya pengetahuan akademik di bidang ekonomi syariah, terutama dalam mempelajari keuangan sosial Islam serta usaha mengatasi masalah kemiskinan. Hingga saat ini, hasil penelitian tentang keefektifan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam mengurangi tingkat kemiskinan masih beragam dan belum mencapai kesimpulan yang sama, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang memberikan bukti nyata secara lebih lengkap. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menggabungkan variabel penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta inflasi dalam satu model analisis. Dengan demikian, penelitian ini membantu memperluas pandangan tentang hubungan antara instrumen redistribusi kekayaan berbasis syariah dengan variabel ekonomi makro.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang memadukan kebijakan ekonomi makro dengan pengoptimalan instrumen keuangan sosial Islam.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga strategi penyaluran dana dapat dirancang agar lebih tepat sasaran

dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti dalam mengembangkan kajian di bidang ekonomi syariah, keuangan sosial Islam, dan analisis kemiskinan di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran penting zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, misalnya dengan menambahkan variabel baru, memperluas wilayah yang diteliti, atau menggunakan metode analisis yang lebih rumit seperti Vector Autoregression (VAR) atau Error Correction Model (ECM).